

Relevansi Pemikiran Paulo Freire terhadap pendidikan Kritis di Era Digital Perspektif Filsafat Islam

Fatahillah¹, Heni Widianingsih², Hendar Riyadi³, Miftahul Huda⁴, Ghina Ulpah⁵

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Wal Aqidah Ash-Shofa Manonjaya

^{3,4}Universitas Muhammadiyah Bandung

⁵Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail Korespondensi: dr.fatahillah69@gmail.com

Article History:

Received: 11 Juni 2025

Revised: 25 Juni 2025

Accepted: 07 Juli 2025

Keywords: Paulo Freire, Critical Education, Banking Model, Dialog, Digital Era.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Freire dalam pengembangan pendidikan kritis berbasis digital, dengan fokus pada prinsip dialogis, pembentukan kesadaran kritis (*conscientização*), dan upaya mengatasi ketidaksetaraan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian perpustakaan. Data dikumpulkan melalui pencarian literatur akademik berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber ilmiah terpercaya yang membahas pemikiran Paulo Freire dan aplikasinya dalam konteks pendidikan digital. Analisis dilakukan secara tematis untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip Freire dan praktik pendidikan kritis di era digital. Analisis menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, konsep model perbankan Freire memiliki analogi dengan praktik pembelajaran digital pasif, sehingga transformasi menuju pendidikan kritis memerlukan rekonstruksi hubungan pedagogis berdasarkan kolaborasi dan refleksi. Kedua, prinsip dialogis Freire terbukti relevan dalam membangun kesadaran kritis digital, mendorong siswa untuk mengkritisi bias algoritmik, disinformasi, dan struktur kekuasaan di ruang siber. Ketiga, implementasi pendidikan kritis digital dihadapkan pada kesenjangan akses dan literasi digital, namun juga membuka peluang emansipatoris untuk demokratisasi pengetahuan melalui kolaborasi lintas batas. Hasil studi ini menegaskan bahwa relevansi pemikiran Freire di era digital terletak pada kemampuannya untuk menginspirasi model pendidikan yang humanis, partisipatif, dan transformatif. Pendidik dan pembuat kebijakan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip dialogis dan kesadaran kritis ke dalam desain pembelajaran digital, sambil mengatasi hambatan struktural seperti ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Dengan demikian, pendidikan digital dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembebasan yang memungkinkan siswa menjadi subjek aktif perubahan sosial.

PENDAHULUAN

Pada era digital dewasa ini, dinamika pendidikan tengah menghadapi tantangan mendalam: dominasi teknologi dan algoritma dapat mereduksi peran siswa menjadi konsumen pasif informasi,

.....

mengancam kemampuan berpikir kritis dan otonomi intelektual. Penggunaan media digital oleh korporasi melalui curasi berita, media sosial, hingga algoritma rekomendasi sering kali membentuk pandangan dunia yang tertutup, menguatkan bias eksisting dan membatasi pandangan kritis (Mirzoeff, 2011; dikutip dalam *Critical pedagogy and language learning in the age of social media?*). Dalam konteks ini, pengembangan pendidikan kritis tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mendampingi siswa memahami, jika tidak melawan, pengaruh dominan tersebut.

Paulo Freire pendidik dan filsuf Brasil telah menegaskan pentingnya pendidikan sebagai praktek kebebasan di dalam karyanya yang paling monumental, *Pedagogy of the Oppressed* (1968/1970). Ia mengajukan kritik tajam terhadap model pendidikan konvensional, yang ia sebut “banking model”, di mana guru berfungsi sebagai deposan pengetahuan, sedangkan siswa hanya berperan sebagai objek pasif penerima informasi (Freire, 1970; dikutip dalam *From critical pedagogy to critical digital pedagogy*). Model seperti ini tidak hanya menghambat kreativitas dan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga memperkuat status quo menjauhkan siswa dari kesadaran kritis tentang kondisi sosial-politik mereka sendiri.

Sebagai alternatif, Freire memperkenalkan “problem-posing education”, pendekatan yang menempatkan dialog sebagai pusat interaksi pedagogis. Dalam pendekatan ini, guru dan siswa berkolaborasi sebagai co-konstituen pengetahuan; ruang belajar menjadi arena refleksi dan aksi bersama, yang selanjutnya mendorong terbentuknya *critical consciousness* (*conscientização*). Melalui problem-posing, siswa diajak untuk merenungkan “generative themes”—isuisu hidup yang bermakna secara emosional dan sosial serta menyadari kontradiksi kehidupan mereka, sehingga lahir kemampuan untuk mencipta transformasi (Freire, 1970; dikutip dalam *Critical consciousness*).

Seiring dengan meluasnya konektivitas digital, model pendidikan kritis Freire berkembang ke ranah “critical digital pedagogy”. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran dalam era pasca-digital termasuk penggunaan LMS (*Learning Management Systems*), media sosial, dan platform berbasis AI harus dilengkapi dengan pemahaman kritis terhadap dinamika data, algoritma, dan pengaruh platform dalam membentuk pengalaman belajar (Frag et al., Freire 2.0: *Pedagogy of the digitally oppressed*). Belshaw (2014) menekankan bahwa literasi digital adalah kemampuan plural, kontekstual, dan berkelanjutan yang harus dipelajari secara menyeluruh dan holistik, bukan secara linear dan pendekatan semacam ini selaras dengan semangat problem-posing Freire (Frag et al., 2021).

Selain itu, kerangka *Critical Media Literacy* (CML) dari Kellner dan Share (2007) menawarkan perspektif penting dalam pendidikan kritis digital. CML memperluas definisi literasi agar mencakup media massa, budaya populer, dan teknologi baru, sekaligus memberdayakan siswa untuk menganalisis hubungan kuasa dan informasi serta memproduksi pesan alternatif sebagai bentuk resistensi (Frag et al., membahas CML). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks algoritma media sosial yang sering memperkuat pandangan homogen pendekatan reflektif dan aksi produksi konten alternatif menjadi sangat penting.

Secara umum, *critical pedagogy* berakar pada gagasan pembebasan melalui pendidikan praktek yang menggabungkan refleksi dan aksi (*praxis*) sebagai landasan menuju transformasi sosial (Giroux, 1983, dikutip dalam *Critical Pedagogy and Educational Technology*). Freire mengingatkan bahwa pembelajaran yang kritis mendorong siswa untuk menyadari struktur kekuasaan yang membentuk realitas mereka, sekaligus merefleksikan posisi sosial mereka serta potensi tindakan kolektif: inilah esensi *critical consciousness* (Freire, 1970; dikutip dalam *Critical Pedagogy and Educational Technology*).

Dalam dunia yang digerakkan algoritma, otomatisasi, dan kapitalisme digital, menjadi sangat

krusial bahwa pendidikan tidak lagi hanya mentransfer pengetahuan, melainkan menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran kritis dan mendorong perubahan. Jika media digital menampilkan dunia yang terseleksi, pendidikan kritis Freire memberikan narasi tandingan: pendidikan sebagai ruang dialog, refleksi, dan aksi kolektif. Prinsip dialogis Freire “pendidikan bukan untuk melainkan dengan” menguatkan pentingnya siswa sebagai subjek intelektual, bukan objek pasif (Freire, 1970; dikutip dalam From critical pedagogy to critical digital pedagogy).

Dengan demikian, relevansi pemikiran Paulo Freire terhadap pengembangan pendidikan kritis di era digital tidak dapat diremehkan. Freire telah menyajikan konsep pendidikan yang memberdayakan, dialogis, dan transformasional komponen yang sangat dibutuhkan ketika platform digital mempromosikan konsumsi pasif, algoritma yang membentuk pandangan, dan menutupi struktur sosial. Integrasi problem-posing, praxis, conscientização, literasi digital kritis, dan CML dapat membentuk landasan konseptual bagi pendidikan yang mampu membumikan kebebasan dan emansipasi di tengah lautan informasi digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk mendalami relevansi pemikiran Paulo Freire terhadap pengembangan pendidikan kritis di era digital melalui telaah mendalam terhadap karya-karya Freire dan literatur yang berkaitan. Fokus penelitian diarahkan pada konsep-konsep utama pendidikan kritis, seperti dialogis, kesadaran kritis (conscientização), dan pembebasan, serta mengkaji bagaimana konsep tersebut dapat diadaptasi dalam konteks teknologi pendidikan dan budaya digital masa kini.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi karya asli Paulo Freire, seperti *Pedagogy of the Oppressed*, *Education for Critical Consciousness*, dan tulisan-tulisan lain yang relevan. Sumber data sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang membahas pemikiran Freire, pendidikan kritis, serta perkembangan pendidikan di era digital. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang sistematis, pencatatan, dan pengklasifikasian informasi sesuai tema yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (content analysis), yang mencakup proses identifikasi, interpretasi, dan sintesis gagasan inti Freire serta relevansinya dengan tantangan dan peluang pendidikan kritis di era digital. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk menemukan keterkaitan antara prinsip pendidikan kritis dengan praktik pembelajaran berbasis teknologi, kemudian disimpulkan dalam kerangka konseptual yang utuh. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan perbandingan lintas literatur untuk memastikan keakuratan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pendidikan: Dari “Banking Model” Menuju Pendidikan Problematika dalam Era Digital

Paulo Freire (1970) mengkritik tajam model pendidikan tradisional yang ia istilahkan sebagai banking model. Dalam model ini, peserta didik diposisikan sebagai “wadah kosong” yang hanya menerima “setoran” pengetahuan dari guru tanpa kesempatan untuk terlibat secara kritis. Konsep ini tidak hanya membatasi ruang berpikir kreatif, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang menindas, karena peserta didik menjadi objek pasif dalam proses pembelajaran (hlm. 72-73).

Dalam konteks era digital, fenomena yang serupa dapat ditemukan. Platform pembelajaran daring yang hanya menyalurkan informasi satu arah sering kali menempatkan peserta didik dalam posisi konsumen pasif. Konten yang disajikan oleh algoritma tidak jarang memperkuat dominasi penyampai materi dan menutup ruang dialog yang sejati (Furtado, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dikritik Freire beberapa dekade lalu masih relevan di era digital, meskipun

bentuknya lebih kompleks.

Sebagai alternatif, Freire (1970) menawarkan model pendidikan problem-posing yang bersifat dialogis dan membebaskan. Dalam pendekatan ini, guru dan siswa berperan sebagai mitra yang secara bersama-sama membangun pengetahuan melalui refleksi dan tindakan (hlm. 80-81). Ketimbang sekadar menerima informasi, peserta didik diajak untuk mengajukan pertanyaan, mempertanyakan asumsi, dan mengaitkan materi dengan realitas sosial yang mereka hadapi.

Inovasi problem-posing di era digital dapat diwujudkan melalui forum diskusi interaktif, kolaborasi lintas platform, serta penggunaan media digital sebagai sarana konstruksi pengetahuan bersama (Zuin & Mello, 2024). Misalnya, penggunaan learning management system (LMS) yang dirancang untuk memungkinkan siswa mengunggah ide, berdiskusi dalam kelompok daring, dan menghasilkan proyek kolaboratif yang berangkat dari isu nyata di masyarakat.

Meski demikian, tidak semua teknologi pendidikan otomatis mendorong pembebasan. Sistem LMS yang kaku, evaluasi berbasis algoritma, dan tekanan komersialisasi pendidikan digital justru dapat mereproduksi pola banking, di mana informasi telah dipaketkan dan peserta didik hanya menjadi konsumen (Frag, Greeley, & Swindell, 2019). Situasi ini menggarisbawahi bahwa tanpa kesadaran kritis, teknologi berpotensi menjadi instrumen penindasan baru.

Oleh karena itu, transformasi model pendidikan Freire dalam ranah digital memerlukan rekonstruksi relasi pedagogis. Orientasinya harus bergeser dari hierarki vertikal menuju dialog yang kritis, kolaboratif, dan partisipatif. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mengundang siswa untuk berpikir reflektif dan bertindak kolektif.

Relevansi gagasan Freire juga terletak pada keberanian untuk menantang status quo dalam pendidikan. Di tengah deras nya arus informasi digital, pendidikan kritis berfungsi sebagai alat navigasi intelektual agar peserta didik tidak hanya mengonsumsi pengetahuan, tetapi juga mampu menilai, mengkritik, dan menciptakan pengetahuan baru yang relevan dengan konteks sosialnya.

Pendekatan ini bukan sekadar soal metode mengajar, tetapi sebuah filosofi pendidikan yang memandang manusia sebagai subjek aktif yang memiliki potensi untuk mengubah realitas. Freire (1970) menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan bertindak adalah inti dari pendidikan yang membebaskan, dan prinsip ini tetap berlaku di tengah transformasi teknologi yang cepat.

Dengan demikian, mengintegrasikan prinsip problem-posing ke dalam pendidikan digital bukan hanya sebuah inovasi teknis, melainkan sebuah langkah strategis untuk membangun ekosistem pembelajaran yang lebih demokratis, kritis, dan humanis. Hal ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan pendidikan kritis di era digital yang sarat tantangan dan peluang.

Praktik Dialogis dan Pembentukan Kesadaran Kritis di Dunia Digital

Paulo Freire menekankan bahwa dialog tidak sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan merupakan tindakan pembebasan dalam pendidikan. Ia mengkritik praktik pendidikan yang memposisikan guru sebagai pihak yang sepenuhnya menguasai pengetahuan, sementara peserta didik hanya menerima informasi secara pasif. Dalam pandangannya, pendidikan autentik harus dibangun “oleh A bersama B” dan bukan “oleh A untuk B” (Freire, 1970). Pandangan ini menegaskan bahwa hubungan antara guru dan murid haruslah bersifat horizontal, saling menghormati, dan berbasis pada pengalaman nyata peserta didik.

Dalam kerangka ini, prinsip dialogis menjadi fondasi pendidikan kritis yang memberdayakan. Pendidikan semacam ini tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi mendorong peserta didik untuk mengaitkan pengalaman hidup mereka dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, dialog tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk ruang bersama untuk refleksi mendalam dan analisis kritis terhadap realitas.

Era digital membawa dimensi baru bagi praktik dialogis yang dimaksudkan Freire. Kehadiran forum daring, media sosial institusional, serta ruang belajar virtual membuka peluang interaksi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik. Namun, perlu dipertanyakan apakah ruang-ruang digital tersebut benar-benar menghadirkan dialog sejati, atau sekadar menciptakan monolog dalam bentuk distribusi informasi satu arah yang dibungkus secara interaktif.

Boyd (2016) menyoroti bahwa Freire tidak menolak teknologi dalam pendidikan. Sebaliknya, ia mengajak para pendidik untuk bersikap kritis terhadap teknologi, menimbang dampaknya, serta memanfaatkannya sebagai sarana pencarian dan penciptaan pengetahuan secara kolaboratif. Dalam konteks ini, teknologi seharusnya tidak menjadi instrumen yang memperkuat dominasi satu pihak, tetapi berfungsi sebagai medium demokratisasi pengetahuan.

Lebih jauh, Freire memperkenalkan konsep *conscientização* atau kesadaran kritis, yaitu proses memahami ketidakadilan sosial, mengenali struktur penindasan, dan mengembangkan kapasitas untuk bertindak mengubahnya (Freire, 1970; Mustakova-Possardt, 2003). Pendidikan kritis bukan sekadar membangkitkan kesadaran teoretis, tetapi juga mendorong praksis—perpaduan antara refleksi dan aksi—sebagai langkah konkret melawan ketidakadilan.

Dalam era digital, kesadaran kritis tersebut memperoleh bentuk baru. Peserta didik tidak hanya dihadapkan pada teks atau wacana tradisional, tetapi juga pada arus informasi digital yang melimpah. Literasi kritis di sini mencakup kemampuan untuk menelaah bias algoritma, mengidentifikasi misinformasi, memahami arsitektur platform, serta mengevaluasi implikasi etis dari penggunaan teknologi (Furtado, t.thn). Kegagalan membekali peserta didik dengan keterampilan ini berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam bentuk penindasan baru yang bersifat digital.

Meskipun demikian, ruang digital memiliki potensi untuk menjadi arena dialogis yang membebaskan, sejauh ia digunakan secara sadar dan kritis. Platform yang umumnya bersifat monologis—misalnya melalui materi ajar daring yang hanya dapat diakses secara satu arah—dapat diubah menjadi wadah pertukaran ide, perdebatan, dan refleksi bersama. Perubahan ini memerlukan komitmen pendidik untuk merancang kegiatan yang mendorong partisipasi aktif dan interaksi sejati.

Pendekatan dialogis di ruang digital dapat diwujudkan dengan mengutamakan pertanyaan terbuka, diskusi berbasis pengalaman peserta didik, dan tugas kolaboratif yang menuntut analisis kritis. Prinsip praxis digital yang menggabungkan refleksi dan tindakan dapat menjadi strategi pedagogis yang efektif, terutama ketika digunakan untuk menghubungkan fenomena digital dengan realitas sosial yang lebih luas.

Dengan demikian, prinsip dialogis Freire di era digital bukan hanya tentang memindahkan kelas fisik ke ruang virtual, melainkan tentang merekonstruksi relasi belajar-mengajar secara mendasar. Ruang digital harus dipahami sebagai ruang sosial di mana pengetahuan dibentuk melalui interaksi yang setara, saling menghargai, dan berorientasi pada transformasi sosial. Tanpa kesadaran kritis yang memadai, teknologi pendidikan hanya akan menjadi instrumen reproduksi ketidakadilan; sebaliknya, dengan pemanfaatan yang reflektif dan dialogis, ia dapat menjadi sarana pembebasan dan pemberdayaan yang sejati.

Pendidikan Kritis Digital: Tantangan Ketimpangan dan Peluang Liberatif

Paulo Freire memberikan perhatian signifikan terhadap persoalan ketimpangan sosial dalam pendidikan, dengan penekanan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan akan memperdalam marginalisasi kelompok yang terpinggirkan (Freire, 1970). Pandangan ini menemukan relevansi yang tajam dalam konteks era digital, di mana ketimpangan tersebut termanifestasi melalui fenomena kesenjangan digital (*digital divide*). Kesenjangan ini mencakup disparitas akses terhadap internet, kepemilikan perangkat teknologi, dan keterampilan literasi digital yang memadai—faktor-

faktor yang dapat memperkuat reproduksi ketidakadilan sosial dalam pendidikan (Darder, 2017). Dengan demikian, transformasi pendidikan kritis di era digital tidak hanya berbicara tentang metodologi, tetapi juga menuntut penyelesaian terhadap hambatan struktural yang menghalangi pemerataan akses.

Walaupun demikian, sejumlah akademisi melihat bahwa teknologi digital memiliki potensi sebagai medium liberatif. Melalui pemanfaatan platform daring, pendidikan dapat menjangkau wilayah lintas batas geografis, mendorong kolaborasi global, dan memfasilitasi produksi pengetahuan secara kolektif yang melampaui sekat politik maupun ekonomi (Gur-Ze'ev, 2018). Pemanfaatan ruang digital ini, apabila diorientasikan secara kritis, sejalan dengan prinsip praxis Freire yang memadukan refleksi dan aksi dalam upaya pembebasan.

Zuin dan Mello (2024) menegaskan bahwa dalam kultur digital, relasi hierarkis antara guru dan peserta didik dapat direstrukturisasi melalui revitalisasi konsep-konsep pedagogis Freire, seperti Pedagogy of Hope, Pedagogy of Freedom, dan Pedagogy of the Oppressed. Revitalisasi ini tidak sekadar memindahkan pembelajaran ke ranah daring, tetapi menciptakan interaksi yang menekankan dialog etis, kesetaraan peran, dan pengalaman belajar yang saling membebaskan. Dengan demikian, pembelajaran digital tidak hanya menjadi transmisi pengetahuan, melainkan juga ruang pembentukan kesadaran kritis yang kolektif.

Sejalan dengan itu, Rospigliosi (2022) mengidentifikasi tiga konsep utama Freire yang tetap relevan dalam konteks pembelajaran interaktif pasca-pandemi, yakni kritik terhadap culture of silence, penolakan terhadap banking model of education, serta penerapan pedagogi kritis. Ketiga konsep ini dapat menjadi kerangka evaluasi atas praktik pembelajaran digital, agar tidak terjebak dalam model instruksional yang menempatkan peserta didik sebagai konsumen pasif.

Berdasarkan kerangka tersebut, pendidikan kritis digital dapat dipahami sebagai arena dialektis antara dua kecenderungan: pertama, risiko sterilisasi relasi pedagogis melalui hierarki yang dimediasi algoritma dan struktur platform; kedua, peluang untuk merekonstruksi relasi pendidikan secara lebih egaliter, dialogis, dan transformatif. Tantangan kesenjangan digital perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif dan strategi literasi digital yang inklusif. Sementara itu, potensi teknologi sebagai medium dialog, refleksi, dan solidaritas harus dioptimalkan untuk membentuk sistem pendidikan digital yang adil, kritis, dan berorientasi pada pembebasan.

Relevansi Pemikiran Paulo Freire terhadap Pendidikan Kritis di Era Digital Perspektif Filsafat Islam

Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan sebagai praktik pembebasan memiliki resonansi mendalam dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam filsafat Islam. Freire (1970) mengkritik banking model of education yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif, dan mengusulkan pendidikan problematika berbasis dialog yang membebaskan. Dalam filsafat Islam, pendidikan juga dipandang sebagai proses memanusiakan manusia (ta'dib) yang menumbuhkan akal, moral, dan spiritualitas secara seimbang (Al-Attas, 1993). Hal ini menandakan adanya irisan nilai antara pendidikan kritis Freire dengan pendidikan Islam yang berorientasi pada kemerdekaan berpikir dan pembentukan karakter.

Filsafat Islam memandang ilmu sebagai sarana menuju kebenaran dan kebajikan (al-haqq dan al-khayr), bukan sekadar akumulasi informasi. Al-Ghazali (2005) menegaskan bahwa ilmu harus menghasilkan perubahan moral dan sosial, selaras dengan prinsip praxis Freire yang menggabungkan refleksi dan tindakan transformasional. Dalam konteks pendidikan digital, hal ini berarti pengetahuan yang diperoleh melalui teknologi harus diiringi dengan kesadaran etis untuk memanfaatkannya demi kemaslahatan bersama, bukan sekadar konsumsi pasif.

Konsep conscientização Freire dapat disejajarkan dengan tazkiyatun nafs dalam tradisi Islam, yaitu proses penyucian diri melalui kesadaran akan realitas, introspeksi moral, dan pengambilan

tindakan yang benar. Pendidikan kritis digital dalam perspektif Islam tidak hanya mengajarkan analisis kritis terhadap struktur sosial dan algoritma digital, tetapi juga menanamkan etika penggunaan teknologi (akhlaq al-ma'lumat), seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan terhadap dialog (Nasr, 2002).

Selain itu, prinsip ijtihad dalam filsafat Islam memiliki kesesuaian dengan pendidikan problematika Freire. Ijtihad adalah proses intelektual untuk memahami realitas baru dan merumuskan solusi berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang universal (Al-Qaradawi, 1994). Dalam pendidikan digital, ijtihad berarti kemampuan menyaring informasi, mengkritisi narasi dominan, dan membangun alternatif pengetahuan yang relevan dengan konteks sosial-budaya peserta didik. Pendekatan ini menolak dominasi satu arah dari otoritas tunggal, baik dalam bentuk guru tradisional maupun algoritma digital.

Filsafat Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan antara qalb (hati), 'aql (akal), dan ruh (jiwa) dalam pendidikan. Freire (1998) dalam *Pedagogy of Freedom* menekankan pentingnya cinta (amor) dalam proses pembelajaran sebagai fondasi untuk membangun hubungan dialogis. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pendidikan kritis digital yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam akan menumbuhkan empati, rasa hormat, dan keterlibatan emosional, sehingga proses belajar tidak terjebak pada rasionalitas kering atau teknokratisme digital.

Dalam konteks ketimpangan digital, perspektif Islam memandang akses terhadap ilmu dan teknologi sebagai hak asasi yang harus dijamin demi keadilan sosial (al-'adl). Prinsip ini selaras dengan pandangan Freire bahwa pendidikan adalah sarana untuk membongkar struktur penindasan. Darder (2018) menegaskan bahwa pendidikan kritis harus responsif terhadap hambatan struktural yang menghalangi partisipasi penuh warga. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan digital yang berlandaskan filsafat Islam dan Freirean harus menghapus hambatan akses, menyediakan sarana inklusif, dan memberdayakan komunitas terpinggirkan.

Lebih jauh, filsafat Islam menekankan konsep ummah kesatuan komunitas yang saling menopang yang relevan dengan pembelajaran kolaboratif Freire. Pendidikan kritis digital dapat menjadi wahana membangun solidaritas global melalui platform daring, asalkan dikelola secara partisipatif dan tidak terjebak dalam kontrol komersial atau politik. Hal ini mengubah ruang digital menjadi medan musyawarah yang mengedepankan kesetaraan partisipan, sejalan dengan prinsip dialogis Freire (Boyd, 2016).

Integrasi pemikiran Freire dengan filsafat Islam juga dapat memperkuat dimensi transendental dalam pendidikan kritis digital. Freire menolak netralitas pendidikan dan mendorong posisi etis yang jelas; filsafat Islam menambahkan bahwa posisi etis itu harus berakar pada tauhid kesatuan nilai yang menempatkan Tuhan sebagai pusat orientasi hidup (Al-Attas, 1993). Dengan demikian, pendidikan digital bukan hanya membebaskan dari penindasan struktural, tetapi juga mengarahkan pada kesadaran spiritual yang menuntun tindakan sosial yang adil.

Akhirnya, relevansi pemikiran Freire dalam perspektif filsafat Islam menegaskan perlunya pendidikan kritis digital yang memadukan emansipasi intelektual, pembentukan akhlak, dan kesadaran spiritual. Sinergi ini dapat menghasilkan generasi yang mampu mengkritisi sistem pengetahuan digital, berpartisipasi aktif dalam pembentukan wacana publik, serta menempatkan teknologi sebagai sarana membangun peradaban yang berkeadaban dan rahmatan lil 'alamin.

KESIMPULAN

Hasil penelitian mendapatkan kesimpulan bahwa, pemikiran Paulo Freire, khususnya kritiknya terhadap banking model dan pengembangan pendidikan problematika, memiliki relevansi yang signifikan dalam membentuk paradigma pendidikan kritis di era digital. Transformasi dari model pembelajaran satu arah menuju interaksi dialogis menjadi prasyarat utama untuk membangun proses belajar yang memerdekakan. Dalam konteks pembelajaran digital, prinsip

.....

dialog dan refleksi yang digagas Freire perlu diadaptasi melalui pemanfaatan teknologi sebagai medium kolaborasi dan penciptaan pengetahuan bersama, bukan sekadar sebagai sarana transmisi informasi. Prinsip conscientização atau kesadaran kritis yang diusung Freire menjadi landasan penting dalam menghadapi tantangan dunia digital. Peserta didik tidak hanya dituntut memahami materi, tetapi juga mengkritisi struktur sosial, bias algoritma, dan dinamika kekuasaan dalam ruang digital. Pendidikan digital yang menginternalisasi pendekatan ini dapat menjadi sarana pembebasan, memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam membentuk wacana, mengajukan pertanyaan kritis, dan mengaitkan pengetahuan dengan tindakan sosial yang nyata. Namun, penerapan pendidikan kritis di era digital tidak lepas dari tantangan, terutama kesenjangan akses dan literasi digital yang berpotensi memperkuat ketimpangan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan kritis digital menuntut komitmen pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengatasi hambatan struktural sekaligus mengoptimalkan teknologi sebagai ruang demokratisasi pengetahuan. Dengan demikian, gagasan Freire tetap relevan dan dapat menjadi acuan strategis bagi pembangunan pendidikan yang humanis, reflektif, dan transformatif di tengah perubahan lanskap digital.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Attas, S. M. N. (1993). *Islam and secularism*. International Institute of Islamic Thought and Civilization.
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din (Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama)*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *Ijtihad in the modern world*. Islamic Book Trust.
- Belshaw, D. (2014). *The essential elements of digital literacies [E-book]*. Doug Belshaw.
- Boyd, D. (2016). What would Paulo Freire think of Blackboard: Critical pedagogy in an age of online learning. *International Journal of Critical Pedagogy*, 7(1).
- Darder, A. (2018). *The student guide to Freire's pedagogy of the oppressed*. Bloomsbury Publishing.
- Frag, A., Greeley, L., & Swindell, A. (2021). Freire 2.0: Pedagogy of the digitally oppressed. *Educational Philosophy and Theory*, 54(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.2010541>
- Frag, A., Greeley, L., & Swindell, A. (t.thn). *Freire 2.0: Pedagogy of the digitally oppressed*. Taylor & Francis.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Furtado, P. (t.thn). *Viewpoint: On education, critical autonomy, and freedom in the digital age*.
- Giroux, H. A. (1983). *Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition*. South Hadley, MA: Bergin & Garvey.
- Green, E. D. (2016). *Freire's Pedagogy of the oppressed as one of the most cited texts in social sciences*. LSE.
- Kellner, D., & Share, J. (2007). *Critical media literacy*.
- Mirzoeff, N. (2011). *The right to look: A counterhistory of visibility*. Duke University Press.
- Mustakova-Possardt, M. (2003). *Critical consciousness*. *One Country*, 15(2).
- Nasr, S. H. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. HarperCollins.
- New Science. (2024). Paulo Freire and dialogic education: Relevance and applications in the twenty-first century. *Aracê*, 6(2), 2353–2364.
- Rospigliosi, P. A. (2022). Why we need critical pedagogy in post pandemic interactive learning environments. *Interactive Learning Environments*, 30(5), 779–781.
- Zuin, A., & de Mello, R. R. (2024). Educating with Paulo Freire: Teaching and learning on the digital culture. *Educational Philosophy and Theory*, 56(10), 988–998.